KOMPAS

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tim Anggaran Siapkan Pergub

Pemprov DKI Jamin Layanan Publik

JAKARTA, KOMPAS — Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta menyiapkan rancangan peraturan gubernur menyusul buntunya pembahasan peraturan daerah tentang APBD tahun 2015 dengan DPRD DKI Jakarta. Dengan produk hukum itu, pemerintah menjamin bergulirnya program pembangunan serta layanan publik.

Hingga batas akhir pembahasan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas rancangan APBD DKI 2015, Jumat (20/3) pukul 24.00, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD DKI gagal menyepakati rancangan menjadi peraturan daerah.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Ahmad Nawawi, delapan dari sembilan fraksi menolak membahas hasil evaluasi karena menganggap draf yang dikirim TAPD ke Kemendagri bukan hasil pembahasan bersama DPRD.

"Kecuali Nasdem, fraksi lain menyerahkan (persoalan APBD) ke Gubernur untuk menyiapkan peraturan gubernur (pergub). Dari sisi waktu jelas tak mungkin (membahas rancangan APBD ini) karena tinggal tiga jam menjelang pukul 24.00. Selain itu, drafnya bukan hasil pembahasan dan kini sedang dipersoalkan panitia angket," kata Nawawi, yang juga anggota panitia angket.

Rancangan peraturan gubernur (pergub) dijadwalkan diserahkan ke Kemendagri Senin (23/3) ini. Namun, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan menunggu sikap DPRD hingga Senin siang. "Siapa tahu DPRD berubah sikap. Kami butuh tanda tangan pimpinan, satu fraksi, dan 13 anggota Badan Anggaran untuk menetapkan perda," ujar Basuki di Balai Kota Jakarta, Minggu (22/3).

Basuki mengatakan, seluruh kebutuhan dana untuk pelayanan publik dan kegiatan rutin aman. Dengan pergub, besaran APBD 2015 akan mengacu pada pagu APBD 2014, yakni Rp 72,9 triliun. "Hanya beda Rp 180 miliar (dari nilai RAPBD 2015), dan kami bisa kurangi beberapa kegiatan yang tidak mendesak," ujarnya.

Tunggu keputusan

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan pimpinan DPRD DKI secara resmi tentang finalisasi hasil pembahasan terhadap evaluasi APBD 2015.

"Batas waktunya Jumat, 20 Maret. Karena terbentur Sabtu dan Minggu, kami tunggu keputusan tertulis dari DPRD DKI Jakarta hari Senin nanti," katanya, Minggu.

Reydonnyzar mengatakan, dirinya belum berani menyatakan apakah APBD DKI 2015 dituangkan dalam perda atau pergub sebelum memegang surat keputusan pimpinan Dewan.

"Setelah kami terima suratnya, Mendagri akan menerbitkan radiogram kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memberlakukan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi penggunaan pagu APBD 2014," paparnya.

Setelah keputusan resmi dari DPRD diserahkan kepada Mendagri, jika ternyata APBD 2015 harus berbentuk pergub, masih ada proses yang harus dijalani untuk penyesuaian anggaran. Menurut Reydonnyzar, berdasarkan aturan, perlu waktu 30 hari kerja sampai pergub disahkan Mendagri.

"Namun, kami akan bekerja cepat. Nanti kami akan evaluasi, asistensi, dan supervisi kepada eksekutif karena mereka belum berpengalaman (membuat APBD dalam format pergub). Dalam rapat maraton, kami akan membuat dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Perlu waktu 6-9 hari," tuturnya.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai, banyak kerugian jika APBD menggunakan anggaran tahun lalu.

"Bisa terjadi duplikasi anggaran pengadaan yang aneh-aneh, seperti UPS. Penyerapan anggaran bisa jadi semakin rendah, hanya 70-75 persen. Pertumbuhan ekonomi juga tidak akan mencapai target 6,3 persen," kata Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sucipto.

Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi berharap agar segera ada kejelasan terkait anggaran yang akan digunakan. Hal itu dibutuhkan untuk bisa merealisasikan program-program prioritas pada tahun 2015 ini.

Menurut Rustam, pada dasarnya, baik mengacu pada pagu anggaran 2014 maupun 2015, pelaksanaan program tidak terlalu berpengaruh. Pasalnya, selisih anggaran tidak terlalu besar.

(FRO/MKN/JAL)